

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KARTU KREDIT

(Studi Kasus Putusan Nomor 626/PID.B/2014/PN.Mks)



OLEH :
SULISTIANI ANWAR
B111 11 063

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
KARTU KREDIT**

(Studi Kasus Putusan Nomor 626/PID.B/2014/PN.Mks)

Disusun dan Diajukan

Oleh

SULISTIANI ANWAR

B111 11 063

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
KARTU KREDIT**

(Studi Kasus Putusan Nomor 626/PID.B/2014/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

SULISTIANI ANWAR

B 111 11 063

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 22 Januari 2016
Dan Dinyatakan Diterima

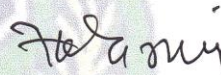
Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19630618 198903 1 002

**a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Mahasiswa :

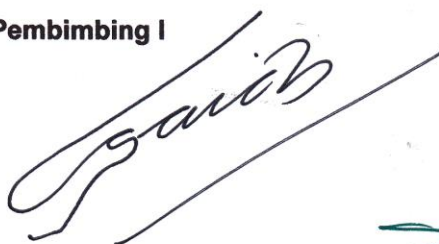
Nama : **SULISTIANI ANWAR**
Nomor Pokok : **B111 11 063**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENADAHAN KARTU KREDIT
(Studi Kasus Putusan
No.626/Pid.B/2014/PN.Mks)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 24 November 2015

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.M.Si.
NIP. 1962 0711 1987 031 001

Pembimbing II



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 1963 0618 1989 031 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **SULISTIANI ANWAR**
No. Pokok : B111 11 063
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan
Kartu Kredit

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2016

a.n. Dekan
Wakil Dekan I


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

SULISTIANI ANWAR (B111 11 063). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KARTU KREDIT (Studi Kasus Putusan Nomor 626/Pid.B/2014/PN.Mks), dibawah bimbingan Bapak Said Karim sebagai pembimbing I dan Bapak Abd. Asis sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan kartu kredit dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan kartu kredit pada Putusan Nomor 626/Pid.B/2014/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan mengambil data yang relevan serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam hal ini hakim yang menangani perkara tersebut. Selain itu penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan mengambil data yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini baik dari literature, buku, maupun perundang-undangan yang terkait.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : (1) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan kartu kredit dalam perkara putusan No.626/Pid.B/2014/PN.Mks yang didasarkan pada fakta-fakta hukum, keterangan saksi dan terdakwa, serta alat bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, dimana pada kasus ini jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ayat (2) KUHPidana. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan. Namun menurut penulis tuntutan tersebut tidak sesuai dengan akibat kerugian yang ditimbulkan. (2) Pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam perkara putusan No.626/Pid.B/2014/PN.Mks adalah benar yakni dengan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam persidangan, alat bukti berupa hasil *visum et repertum* dan keterangan terdakwa dan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kartu Kredit (Studi Kasus Putusan No.626/Pid.B/2014/PN.Mks)”** sebagai salah satu persyaratan yang wajib mahasiswa Fakultas Hukum selesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam bagi junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat manusia diseluruh dunia.

Setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran akan menjadi berkah dan memperoleh manfaat yang maksimal. Meskipun demikian, penulis menyadari kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak terutama kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. Anwar Bolong dan Ibunda tercinta Hj. Berlian, karena dengan dorongan semangat dan motivasi dari mereka yang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun kadang ada sesuatu hal yang menghambat. Terima kasih banyak karena tidak pernah berhenti mendidik dengan penuh kasih sayang serta tak pernah mengeluh dan bosan memberikan nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis dari kecil hingga sekarang ini. Terima kasih kepada saudariku Selviana Anwar S.Kep.Ns. karena telah menjadi kakak yang sangat sabar membimbing adiknya selama ini dan terima kasih karena telah menjadi salah satu sosok yang ku idolakan dari kecil hingga saat ini. Terima kasih kepada kakak iparku Muhammad Noor dan keponakan kecil Ahmad Syahrizzam Noor serta keluarga besar mulai dari nenek, om, tante, kakak-kakak dan adik-adik sepupu yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi selama ini.

Melalui kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga rampungnya skripsi ini, yakni kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan memberikan arahan yang mendidik bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S, Bapak Dr. Amir Ilyas,S.H.,M.H, dan Ibu Hijrah Adhyanti M, S.H.,M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen bagian Hukum Pidana atas pendidikan dan ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
6. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk meneliti serta mengambil data yang diperlukan.
7. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu banyak selama ini.
8. Teman-teman Mediasi angkatan 2011 atas dorongan dan motivasi kepada penulis.

9. Sahabat-sahabatku tercinta Adi Almuqsith Garusu, Aswar Leo, Fauzi Albadila, Andi Emi Wulansari, Igun Fuji Sejati, yang telah memberi banyak hal yang tak terlupakan dan setia menemani penulis dari awal sampai akhir.
10. Saudara-saudaraku Enita, Sry Hardianty Amreiny, Malia, Rizkiyanti Hasan, Rabbayati, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
11. Keluarga besar UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin, kepada Matt Azmar S.Sn selaku pelatih tari sekaligus salah satu sosok yang penulis kagumi dan hormati, Andi Musawir Kamil S.Sn dan kakak-kakak pemusik Makassar Art, saudara-saudara saya di UKM Seni Tari Unhas, Putri Ayu Parmawati, Marliani Rara, Arini Fitri, Ikram Hadi Muqfi, Ummi Khumayrah, Nurfitriyah Marjan, Inun Magfirah, Dirga Dijaya Mulyadi, Achmad Zuharyadi dan teman-teman dan kakak-kakak yang tidak saya sebutkan. Terkhusus untuk Badan Pengurus UKM Seni Tari Unhas Periode 2014/2015.
12. Teman-teman KKN Unhas gelombang 88 Kecamatan Bontonompo Selatan atas waktu dua bulan yang sangat menyenangkan.
13. Serta semua pihak yang telah banyak membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu.

Atas segala bantuan dan kerja sama yang telah diberikan selama proses studi penulis, tidak ada kata yang dapat terucap selain

terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai ibadah dan meridhoi segala aktivitas kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 24 November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tindak Pidana	5
1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	5
B. Tindak Pidana Penadahan	10
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan	13
3. Pengertian Kartu Kredit	14
C. Pidana dan Pemidanaan	15

1. Pengertian Pidana.....	15
2. Teori-teori Pemidanaan.....	16
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (<i>Vergeldings Theorien</i>)	16
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (<i>Doel Theorien</i>).....	18
c. Teori Gabungan (<i>Verenigingstheorien</i>)	19
3. Jenis-jenis Pidana	20
4. Tujuan Pemidanaan	34
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	35
1. Alasan yang Meringankan Pidana.....	37
2. Alasan yang Memberatkan Pidana	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kartu Kredit pada Putusan No.626/Pid.B/ 2014/PN.Mks.....	44
B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kartu Kredit pada Putusan No.626/Pid.B/ 2014/PN.Mks.....	54

BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*), oleh karena itu untuk mewujudkan prinsip negara hukum itu maka hukum itu sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Penerapan hukum secara konsisten selain mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum juga mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) adalah landasan konstitusional negara ini yang memuat bahwa salah satu tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan umum. Maka semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.

Kejahatan pada dasarnya ditekankan kepada perbuatan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum atau peraturan - peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Perbuatan yang menyimpang

itu berasal dari perkembangan kepentingan bagi setiap individu, yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingannya sendiri, Tetapi tidak semua orang atau kelompok dapat menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Jika seseorang atau kelompok tersebut mengalami suatu kegagalan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri, maka seseorang atau kelompok tersebut bisa saja melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan bisa menimbulkan atau mengakibatkan kerugian pada orang lain serta masyarakat umum, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Semakin meningkatnya pelaku kejahatan akhir-akhir ini mengusik ketenangan masyarakat dan menyebabkan masyarakat tidak leluasa melakukan kegiatannya masing-masing terlebih pada malam hari. Salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat yaitu pencurian yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana). Maka dari itu Negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Selain itu, penadahan juga menjadi salah satu bentuk kejahatan yang juga berkaitan dengan harta benda. Oleh karena itu perlindungan atas hak milik berupa harta benda dipertegas Pasal 28 H ayat (4) UUD NKRI 1945. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenangnya oleh siapa pun.

Banyak peristiwa si pelaku melakukan perbuatan ini sekaligus untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau setidaknya tidaknya menguntungkan diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penadahan maka haruslah diberikan sanksi agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam suatu bentuk tugas akhir yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kartu Kredit (Studi Kasus Putusan No. 626/Pid.B/2014/PN.Mks)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan kartu kredit?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan kartu kredit pada putusan No. 626/Pid.B/2014/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah Penulis kemukakan maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan kartu kredit.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan kartu kredit pada putusan No. 626/Pid.B/2014/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.
2. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana sebagaimana menurut Moeljatno (2009:1) adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. Menurut Amir Ilyas (2012:19) *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti:

- *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan suatu ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat luas.

Pakar hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana (Ike Pratiwi, 2014:9), dengan istilah:

1. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman;
3. *Criminal ACT* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Pada umumnya, tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dilakukan oleh seseorang dan perlu diberikan penjatuhan hukuman demi terpeliharanya tertib hukum.

Simons merumuskan bahwa:

Een strafbaar feit adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Kanter dan Sianturi, 2012:205).

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan pidana sesuai undang-undang (selanjutnya disingkat UU).

Menurut Amir Ilyas (2012:28) bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua sudut pandang, yaitu: (1) sudut teoretis yang berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, dan (2) sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Adami Chazawi (2002:78) mengemukakan:

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoretisi yang menganut paham dualisme dan monisme.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan);

Berdasarkan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Adami Chazawi (2002:79) dalam bukunya mengemukakan bahwa menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda.

Menurut Adami Chazawi (2002:80) melalui batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut (Adami Chazawi, 2002:81) :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan

Meskipun beberapa rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur mengenai diri orangnya.

2. Unsur rumusan tindak pidana dalam KUHPidana.

Pada Buku II KUHPidana termuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III KUHPidana memuat mengenai pelanggaran. Ternyata pada Buku II dan Buku III KUHPidana ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Berdasarkan pendapat Adami Chazawi (2002:81) rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, diantaranya:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Terdapat dua unsur yang termasuk unsur subjektif, yakni kesalahan dan melawan hukum, sedangkan selebihnya termasuk dalam unsur objektif.

B. Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Pengertian penadahan dari segi tata bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang diberi awalan pe- dan akhiran -an (Tim Reality, 2008:611).

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Reality, 2008:611) dijelaskan bahwa tadah adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh dari atas. Menadah : menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan, menampung; menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi).

Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang (Andi Hamzah, 2009:151).

Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480

KUHPidana:

1. Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan (Solahuddin, 2008:114).

Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUHPidana, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadah bertindak hampir selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang “diperoleh dari kejahatan” dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan.

Penadahan termasuk dalam delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan maka hal tersebut memudahkan orang lain melakukan kejahatan misalnya pencurian. Jadi dapat dikatakan bahwa jika ada orang yang melakukan penadahan tentu memudahkan orang mencuri karena ada tempat untuk menyalurkan hasil curian mereka.

Andi Hamzah (2010:133), pada Pasal 481 KUHPidana mengenai penadahan sebagai mata pencaharian, berbunyi:

1. Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan Pasal 35 no 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Kebiasaan menurut Hoge Raad 11 februari 1911 berdasarkan pengulangan perbuatan dalam jangka waktu yang patut.

Untuk mengadili pelaku tindak pidana penadahan tidak mesti menunggu pencuri diadili lebih dulu. Dalam hal ini apabila dipandang cukup dengan telah terbuktinya ada orang yang kecurian dan barang-barang ada pada penadah maka pelaku telah bisa untuk diadili.

Tindak pidana penadahan yang dilakukan setelah selesai melakukan suatu kejahatan terhadap harta kekayaan yaitu mengenai suatu barang yang diperoleh dari kejahatan biasanya dianggap akan memudahkan atau menolong kejahatan tersebut. Sekedar si pelaku kejahatan mengharapkan bahwa barang yang telah dicuri, dirampas, digelapkan, atau diperoleh dengan penipuan, atau ditampung oleh seorang penadah akan mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan. Dengan demikian pelaku tindak pidana tersebut akan dengan mudah mengulangi perbuatannya untuk memperoleh barang dengan jalan kejahatan.

Jadi menurut penulis, tindak pidana penadahan ialah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dimana pelaku menerima

suatu barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHPidana (Lamintang, 2009:364) memiliki unsur-unsur yang terdiri atas:

- a. Unsur subjektif, yaitu:
 1. Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*;
 2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*;
- b. Unsur objektif, yaitu:
 1. *Kopen* atau membeli;
 2. *Buren* atau menyewa;
 3. *Inruilen* atau menukar;
 4. *In pand nemen* atau menggadai;
 5. *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian;
 6. *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan;
 7. *Verkopen* atau menjual;
 8. *Verhuren* atau menyewakan;
 9. *In pand geven* atau menggadaikan;
 10. *Vervoeren* atau mengangkut;
 11. *Bewaren* atau menyimpan;
 12. *Verbergen* atau menyembunyikan.

3. Pengertian Kartu Kredit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Reality, 2008:339) pengertian kartu adalah kertas persegi panjang yang agak tebal untuk berbagai keperluan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran diangsur (dicicil); pinjaman uang dengan pengembaliannya diangsur; penambahan

saldo rekening, sisa uang, modal, dan pendataan bagi penabung (Tim Reality. 2008:387).

Kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa dimana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu.

Pengertian kartu kredit dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Ali Arifin, 2012:146), yaitu :

Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.

Dari pengertian kartu kredit diatas, dapat disimpulkan bahwa kartu kredit adalah salah satu bentuk alat bayar dalam

transaksi jual beli barang/jasa disamping dalam bentuk uang dan cek yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan untuk memudahkan nasabah bertransaksi . Kartu kredit dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu, dimana bank mengikat perjanjian, seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran dan lainnya.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (*Belanda*), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu delik.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Andi Hamzah (2012:19), ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yaitu :

Pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya

merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi membeda-terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

2. Teori-teori Pemidanaan

Teori pemidanaan telah dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar (Adami Chazawi, 2002:138), yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud untuk memberi efek jera kepada pelaku kejahatan.

Menurut Adami Chazawi (2002:158) tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan tersebut, yaitu sebagai berikut.

Dari sudut etika, Emmanuel Kant mengemukakan bahwa:

Tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. Pemerintahan negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan ini harus dilakukan sekalipun tidak memiliki manfaat bagi masyarakat ataupun orang yang bersangkutan. Karena pembalasan melalui pidana ini didasarkan pada etika (Adami Chazawi, 2002:159).

Hegel mengemukakan bahwa:

Pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan. Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh karena itu haruslah diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (Adami Chazawi, 2002:159).

Pandangan lain yang dikemukakan oleh Herbart adalah:

Apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai maka harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal terhadap pelakunya (Adami Chazawi, 2002:160).

Heymans mengemukakan bahwa:

Setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan ini berupa penderitaan yang adil. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh dicapai orang (Adami Chazawi, 2002:161).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu maka diperlukan pidana.

Menurut Adami Chazawi (2002:162), pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti;
2. Bersifat memperbaiki;
3. Bersifat membinasakan.

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, (Adami Chazawi, 2002:166) yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam dua teori sebelumnya. Pada teori absolut memiliki kelemahan yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana. Sedangkan kelemahan teori relatif yaitu juga dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana yang bertentangan dengan keadilan. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

3. Jenis-jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHPidana. Menurut KUHPidana, pidana dibagi menjadi 2 kelompok (Adami Chazawi, 2002:25), yaitu:

1. Pidana pokok, terdiri dari:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;

2. Pidana tambahan terdiri dari:
 - a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Adapun penjelasan yang akan dipaparkan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

- a.) Pidana Mati

Dalam KUHPidana ada sembilan buah delik yang mengancam pidana mati, diantaranya: Pasal 104 KUHPidana, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 124, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 36 ayat (4), Pasal 444, Pasal 479 ayat (2), dan Pasal 479 ayat (2) KUHPidana.

Pada KUHPidana juga terdapat ancaman pidana mati, seperti Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 21 (prp) 1959 yang dapat memperberat ancaman pidana delik ekonomi jika dapat menimbulkan kekacauan perekonomian dalam masyarakat, UU Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997) khususnya pada Pasal 80 ayat (1) butir a, Pasal 82 ayat (1) butir a, ayat (2) butir a, UU Psikotropika (UU Nomor 5 Tahun 1997) pada Pasal 59 ayat (2) dan UU Nomor 31 Tahun 1999) khususnya pada Pasal 2 jika dalam keadaan tertentu.

Pidana mati tercantum di dalam Pasal 36 jo. Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dan Pasal 37 jo. Pasal 9 a, b, c, d, e UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

(HAM). Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14 UU Nomor 1 (prp) Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme diluar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14).

Di dalam semua peraturan perundangan-undangan yang telah disebutkan di atas, pidana mati itu selalu telah diancamkan secara alternatif dengan pidana-pidana pokok yang lain, yakni pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

b.) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan/kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Indonesia pada zaman kolonial dikenal juga sistem pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa Gubernur Jendral (*exorbitante*). Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.

Pidana seumur hidup tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima belas tahun). Pengecualian terdapat di luar KUHPidana, yaitu seperti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971). Oleh karena itulah pula, ada kemungkinan orang yang telah dijatuhi pidana seumur hidup dan telah dikuatkan dengan penolakan grasinya akan berbuat semaunya di dalam penjara karena mereka beranggapan bagaimana juga ia berbuat baik jika mereka tidak akan mendapatkan pembebasan.

Pidana penjara disebut sebagai pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu.

c.) Pidana Kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan (Andi Bastian, 2011:13), yaitu:

- a. Sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHPidana) dan pailit sederhana (Pasal 386 KUHPidana).
- b. Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Pada delik *dolus* tidak ada pidana kurungan, kecuali dalam satu Pasal diatur tentang unsur sengaja dan *culpa* seperti Pasal 483 dan 484 KUHPidana. Sebaliknya, terdapat pidana penjara dalam delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal jugaterdapat unsur sengaja dan *culpa*. Contohnya ialah Pasal 293 KUHPidana.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan pada Pasal 69 ayat (1) KUHPidana bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHPidana yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana mati dan pidana penjara. Memang seperti dikemukakan dimuka, pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran.

Perbedaan lain dengan pidana penjara ialah dalam pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain di luar tempat berdiam pada waktu eksekusi, tanpa kemauannya sendiri. Perbedaan lainnya lagi ialah pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan dibanding terpidana penjara (Pasal 19 ayat (2) KUHPidana). Suatu keputusan khusus untuk orang Indonesia tercantum di dalam Pasal 20 KUHPidana jo. Sbid 1925 No. 28,

bahwa hakim di dalam keputusannya boleh menentukan bahwa jaksa boleh mengizinkan kepada orang terpidana penjara dan kurungan paling lama satu bulan untuk tinggal bebas di luar penjara setelah selesai jam kerjanya. Terpidana harus melaporkan diri ditempat kerja yang ditentukan dan jika dilalaikan ia akan menjalani pidananya di dalam penjara.

Pidana kurungan harus diberikan tempat tersendiri, biasanya di rumah tahanan, dimana sering ditempatkan pula orang-orang yang disandera. Keadaan di Indonesia masih menuju arah pembangunan rumah tahanan (RUTAN) sebagaimana yang ditentukan dalam KUHPidana. Untuk sementara rumah penjara yang ada masih juga digunakan sebagai rumah Negara dimaksud. Hakim di Indonesia jarang menjatuhkan pidana kurungan, kecuali terhadap pengemis dan juga apabila ada keramaian serta datangnya tamu asing.

d.) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara. Mungkin sama dengan pidana mati dan pidana pengasingan. Pidana penjara terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula. Pidana denda

juga dikenal pada zaman Kerajaan Majapahit. Begitu pula pelbagai masyarakat primitive dan tradisional di Indonesia.

Pada zaman sekarang ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Sekarang ini ada kecenderungan menerapkan pidana denda juga pada delik berat, tetapi bersifat akumulasi, artinya diterapkan pidana penjara dan juga pidana denda pada delik-delik tertentu terutama delik yang menimbulkan kerugian.

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan terhadap orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Lagipula denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika terpidana tidak dapat membayarnya. Selain itu, denda tidaklah diperhitungkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam

perkara perdata. Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar kerugian secara perdata kepada korban. Hal inilah yang banyak disalah artikan oleh orang awam, terutama dalam hal pelanggaran lalu lintas sering dipikir jika telah membayar ganti kerugian kepada korban (kadang-kadang diperantarai oleh oknum kepolisian sendiri), tuntutan pidana telah terputus. Sebenarnya tuntutan pidana tetap dapat dilakukan oleh jaksa, yang meskipun hanya bersifat meringankan yang nantinya akan dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim dalam praktiknya. Pada kenyataannya, perkara demikian seringkali diselesaikan dengan danya perdamaian para pihak tanpa adanya tindak lanjut ke kejaksaan oleh karena telah ada perdamaian sebelumnya tersebut.

Kadang-kadang denda dijatuhkan dalam perkara administrasi dan fiksas, misalnya denda terhadap penyelundupan dan penunggakan pajak. Nahkan di Indonesia banyak instansi yang menjatuhkan denda administrasi secara sepihak, misalnya denda terhadap mereka yang terlambat mengganti tanda nomor kendaraan (STNK), terlambat mengganti kartu penduduk, mendirikan bangunan sebelum izin keluar, dan lain-lain. Denda jenis ini sudah pasti bukan

jenis pidana denda melainkan hanya merupakan suatu denda administratif, meskipun memiliki sifat yang sama.

Denda administratif ini lebih berat dibandingkan dengan denda pidana karena dalam menjatuhkan denda administratif, pelanggar sama sekali tidak diberi kesempatan membela diri, berbeda dengan terdakwa yang mempunyai seperangkat hak-hak yang ditentukan dalam KUHPidana.

Dalam undang-undang, tidak ditentukan batas minimum khususnya besar denda yang harus dibayar melainkan hanyalah ketentuan minimum umum yang semula dua puluh lima sen, kemudian diubah dengan UU No. 18 (Prp) Tahun 1960 (LN 1960 No. 52) menjadi lima belas kali lipat. Lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan secara kasus demi kasus dengan putusan hakim minimum umum satu hari dan maksimum enam bulan (Pasal 30 ayat (3) KUHPidana). Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan bulan dalam hal gabungan (*concursum*), residive, dan delik jabatan menurut Pasal 52 dan 53 bis (Pasal 30 ayat (5) KUHPidana). Jangka waktu membayar denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan grasi tidak menunda pembayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok atau adanya penambahan pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dan perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah bersifat *accesories* yang mengikut pada pidana pokok. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperative, yaitu dalam Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHPidana.

Pidana tambahan sebenarnya tidak bersifat preventif melainkan bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapatkan Grasi.

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang dan mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya pada Pasal 350 KUHPidana.

Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah, pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup, pada pidana penjara atau kurungan sementara lama pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHPidana).

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para kaisar kerajaan romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kekayaan. Pidana perampasan kemudian muncul dalam *code penal* 1810 walaupun di Belanda dihapus pada abad ke-18. Pidana perampasan kemudian muncul dalam WvS Belanda dan berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHPidana kita tercantum di dalam Pasal 39 KUHPidana. Dalam pasal itu ditentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan.

c. Pengumuman putusan Hakim

Pada Pasal 43 KUHPidana, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan

berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh ialah Pasal 126 ayat (3) KUHPidana (menunjukkan Pasal 127 KUHPidana yaitu, dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal 206 ayat (2) KUHPidana (menunjukkan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana, yaitu menjual dan seterusnya, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang), Pasal 261 KUHPidana (menunjukkan Pasal 359 s/d Pasal 360 KUHPidana, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat), Pasal 377 ayat (1) KUHPidana (menunjukkan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHPidana yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 395 ayat (1) KUHPidana (menunjukkan Pasal 405 ayat (2) KUHPidana, yaitu kejahatan curang), Pasal 405 ayat (2) KUHPidana (menunjukkan Pasal 392 dan Pasal 405 KUHPidana, yaitu merugikan yang berpiutang atau berhak).

KUHPidana mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut :

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.

Dalam persidangan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum menurut hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok, sesuai dengan jenis dan batasan maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dianggap terbukti adalah suatu keharusan, yang berarti imperatif.

Sifat imperative ini sesungguhnya sudah terdapat dalam setiap rumusan tindak pidana, di mana dalam rumusan kejahatan maupun pelanggaran hanya ada dua kemungkinan, yaitu diancamkan satu jenis pidana pokok saja. Artinya hakim tidak bisa menjatuhkan jenis pidana pokok yang lain. Dan tindak pidana yang diancam dengan dua atau lebih jenis pidana pokok, di mana sifatnya alternatif, artinya hakim harus memilih salah satu saja. Sementara itu menjatuhkan jenis pidana tambahan bukanlah suatu keharusan

(fakultatif). Apabila menurut penilaian hakim, kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan salah satu jenis pidana tambahan yang didakwakan jaksa penuntut umum telah terbukti, hakim boleh menjatuhkan dan boleh tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut. Walaupun prinsip dasarnya penjatuhan jenis pidana tambahan itu bersifat fakultatif, tetapi ada juga beberapa pengecualian, dimana penjatuhan pidana tambahan menjadi bersifat imperatif, misalnya terdapat pada Pasal 250 bis, 261, dan 267.

2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.

Penjatuhan jenis pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana pokok, melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu putusannya itu telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Artinya, jenis pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana pokok, melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok.

3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

Pengecualiannya adalah apabila pidana yang dijatuhkan itu adalah jenis pidana pokok dengan bersyarat (Pasal 14a) dan syarat yang ditetapkan dalam putusan itu tidak dilanggar. Sifat jenis pidana pokok yang merupakan prinsip dasar pidana pokok, yaitu tidak dapat dijatuhkan secara kumulasi. Seperti yang telah dicantumkan pada setiap rumusan baik kejahatan (Buku II) maupun pelanggaran (Buku III) bahwa, dalam rumusan tindak pidana hanya diancam dengan satu jenis pidana pokok saja dan dalam beberapa rumusan tindak pidana yang diancam dengan lebih dari satu jenis pidana pokok ditetapkan sebagai bersifat alternatif (misalnya 340, 362, dan lain-lain), dengan menggunakan perkataan atau.

4. Tujuan Pemidanaan

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa pendapat dan juga pandangan dari pakar hukum, tetapi Van Bemmelen telah berpikir lebih maju, yakni dengan tidak melihat pidana itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, melainkan beliau telah mengaitkan lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan itu antara lain dengan tujuan yang ingin dicapai orang denga lembaga-lembaga tersebut.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals Preventif) maupun secara menakut-nakuti orang

tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Andi Bastian, 2011:23).

Di Indonesia sendiri hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, rancangan KUHPidana telah menetapkan tujuan pemidanaan pada buku kesatu ketentuan umum dalam bab II dengan judul pemidanaan, pidana, dan tindakan.

Pakar hukum P.A.F. Lamintang mengelompokkan tujuan pemidanaan menjadi tiga sasaran (Andi Bastian, 2011:24), yaitu:

- a. Memperbaiki pribadi penjahat;
- b. Membuat orang menjadi jera;
- c. Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan

D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Hakim sebagai orang yang berwenang memutuskan suatu perkara tidak boleh sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Hakim harus bisa bersifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim merupakan sosok yang dipercaya oleh sebagian masyarakat dan dapat memberi rasa keadilan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHPidana. Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAPidana) yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Lilik Mulyadi (2007:193) mengemukakan bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan, selain itu majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritis dan praktis, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara *limitative* menetapkan pendiriannya.

Bambang Waluyo (2008:91) dalam menjatuhkan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

1. Alasan yang Meringankan Pidana

Alasan peringanan pidana yang terdapat dalam KUHPidana adalah, sebagai berikut:

- a. Dalam hal umur yang masih muda (*incapacity or infacy*) berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHPidana, jika hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.
- b. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHPidana, maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.
- c. Dalam hal membantu melakukan kejahatan. Berdasarkan pasal 57 ayat (1) KUHPidana, maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga dari pembantu (Ike Pratiwi, 2014:42).

Hal-hal yang memperingan pidana juga terdapat dalam rancangan KUHPidana nasional yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan pada waktu itu berumur 12 (duabelas) tahun atau lebih, tetapi masih di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Seseorang mencoba melakukan atau membantu melakukan terjadinya tindak pidana;
- c. Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan suka rela menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- d. Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana;
- e. Seseorang telah melakukan tindak pidana dengan suka rela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki akibat perbuatannya;
- f. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya (Ike Pratiwi, 2014:43).

2. Alasan yang Memberatkan Pidana

Alasan pemberatan pidana berdasarkan KUHPidana adalah sebagai berikut (Ike Pratiwi, 2014:45):

- a. Dalam hal *concurcus*, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHPidana yang berbunyi:

Pasal 65.

1. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

Pasal 66.

1. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan

pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

2. Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.
- b. Dalam hal *recidive*, berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHPidana. Hal-hal yang memberatkan pidana juga terdapat dalam rancangan KUHPidana nasional yang berbunyi sebagai berikut:

Pidana diperberat dalam hal:

- a. Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pada waktu melakukan tindak pidana mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya;
- b. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang negara Republik Indonesia;
- c. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
- d. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- e. Tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara yang kejam;
- f. Tindak pidana dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana alam;
- g. Tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
- h. Terjadinya pengulangan tindak pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar, lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Pengadilan Negeri Makassar. Ditempat ini penulis mengambil data berupa salinan putusan No. 626/Pid.B/2014/PN.Mks. Pertimbangan Penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena terdapat cukup data yang relevan mengenai kasus yang penulis angkat pada penelitian ini. Selain itu Makassar merupakan domisili penulis sehingga lebih mudah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dan penelitian secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.
2. Data Sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh dengan berpedoman pada literature atau penelitian kepustakaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan

judul yang terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan. Misalnya buku, aturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

2. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu pengumpulan metode dengan cara turun langsung kelapangan. Untuk mendapatkan informasi penulis mendatangi pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Dilakukan dengan menggunakan pengamatan/penelitian secara langsung dilapangan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait.

b. Studi dokumentasi

Dengan cara mengumpulkan data, membaca dan menelaah putusan pengadilan No. 626/Pid.B/2014/PN.Mks serta beberapa literatur, buku, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kartu Kredit pada Putusan No.626/Pid.B/ 2014/PN.Mks

Suatu tindak pidana mampu menimbulkan suatu kerugian bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari atau yang menjadi sebab yang melahirkan suatu akibat. Tindak pidana terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang mengarah kepada timbulnya akibat hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatan pelaku yang mampu merugikan orang lain tersebut.

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya suatu delik tersebut yaitu untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan suatu pertolongan jahat. Maksud dari pertolongan jahat ini bukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 KUHPidana, yang mana pada pasal tersebut pertolongan jahat berarti “membantu melakukan kejahatan”. Penadahan menjadi salah satu pemicu seseorang melakukan kejahatan karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 480 KUHPidana. Agar

lebih memudahkan penulis dalam pembahasan ini, maka penulis menguraikan dalam bentuk kasus sebagai berikut:

1. Identitas

Berikut identitas terdakwa berdasarkan putusan pengadilan

No. 626/Pid.B/2014/PN.Mks

Nama Lengkap : Muh. Risal Dg. Mangatta bin Risman alias Ambo
alias Candiki alias Ical

Tempat Lahir : Makassar

Umur : 29 tahun

Tanggal Lahir : 2 Februari 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Makmur No. 29 Lr. 04 Kota Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SMP (Tamat)

2. Posisi Kasus

Putusan pidana No.626/Pid.B/2014/PN.Mks tentang sebuah kasus mengenai tindak pidana penadahan kartu kredit yang dilakukan oleh Muh. Risal Dg. Mangatta bin Risman alias Ambo alias Candiki alias Ical. Pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2014 kira-kira pukul 13.30 WITA Muh. Rajab Yusri bin Mahmud Kassa Dg. Mudo alias Rajab bersama Ramba Dg. Maele alias Thomas melakukan pencurian

sebuah tas milik seorang wanita yang bernama Mita D.M Sampepajung. S.E.,MSC yang waktu itu baru saja keluar dari rumah makan ujung pandang yang terletak di jalan Irian bersama suaminya yang bernama Dr. Djonny Ferianto,SP.B(K) Onk dan tengah berjalan menuju ke mobil mereka yang terparkir di pinggir jalan rumah makan tersebut. Thomas kemudian memberi Rajab hasil curian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 buah handphone blackberry, serta 4 buah kartu kredit. Berkisar pada pukul 16.00 wita Rajab lalu menelpon terdakwa Ical untuk datang ke rumahnya dan pada pukul 17.00 wita Ical pun datang ke rumah Rajab. Saat itulah Rajab kemudian menyerahkan 4 buah kartu kredit kepada Ical untuk digesek atau digunakan masing-masing 1 buah kartu kredit bank BRI, 1 buah kartu kredit bank Mandiri, 1 buah kartu kredit bank Muamalat, dan 1 buah kartu kredit bank BCA. Kemudian kartu kredit bank Mandiri tersebut digesek/dicairkan secara tunai sebesar Rp. 700.000,- di SPBU Jl. Sam Ratulangi karena hanya kartu kredit tersebut yang dapat digunakan oleh terdakwa Ical, kemudian Ical lalu memakai kartu kredit tersebut untuk berbelanja dengan total belanjaan sebesar Rp. 600.000,- di alfamart jalan masjid raya padahal Ical mengetahui jika Rajab tidak mempunyai kartu kredit apalagi berjumlah 4 buah. Ical menjelaskan bahwa kartu kredit tersebut telah digunakannya sebanyak 5 kali yaitu pada saat mencairkan dana tunai di SPBU sebesar Rp.300.000,-, mencairkan dana tunai sebanyak Rp.

200.000,- di SPBU Ratulangi, berbelanja di Alfamart di jalan masjid raya sebanyak Rp. 600.000,-, lalu mencairkannya lagi sebanyak Rp. 200.000,- di SPBU jalan Ratulangi serta memakai kartu kredit tersebut pada saat mengisi BBM motor terdakwa di SPBU jalan Ratulangi. Rajab telah sebelumnya berpesan kepada Ical untuk berhati-hati menggunakan kartu kredit tersebut. Pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 kira-kira pukul 05.00 wita Ical datang ke rumah Rajab sambil membawakan satu pak rokok Sampoerna serta satu bungkus minyak goreng dan Ical mengatakan bahwa telah menggunakan kartu kredit tersebut untuk berbelanja di alfamart tetapi Rajab tidak mengetahui bahwa Ical juga sempat menggunakannya di tempat lain. Setelah itu Ical lalu meninggalkan rumah Rajab.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan surat yang hanya dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari Negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 April 2014 dengan No.Reg.Perk: PDM-17/Pel/Ep.1/04/2014 dan telah didakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muh. Risal Dg. Mangatta bin Risman Ambo alias Candiki alias lcal pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 kira-kira pukul 16.00 wita yang bertempat di rumah saksi Muh. Rajab Yusri bin Mahmud Kassa Dg. Mudo alias Rajab di Jalan Tanjung Bayam/Jl. Seroja No. 26 Kota Makassar telah melakukan, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut.

- Pertama:

Pada waktu dan tempat diatas, terdakwa lcal ditelepon oleh saksi Muh. Rajab untuk datang ke rumahnya kemudian pada pukul 17.00 wita terdakwa lcal datang ke rumah saksi Muh. Rajab, lalu saksi menyerahkan 4 buah kartu kredit masing-masing 1 buah kartu kredit bank BRI, 1 buah kartu kredit bank Mandiri, 1 buah kartu kredit bank Muamalat, dan 1 buah kartu kredit bank BCA untuk digesek. Terdakwa lalu menggunakan kartu kredit bank Mandiri tersebut untuk dicairkan secara tunai sebesar Rp. 700.000,- di SPBU jl. Sam Ratulangi. Terdakwa kemudian memakai kartu kredit tersebut untuk berbelanja dengan total belanjaan sebesar Rp. 600.000,- di alfamart Jalan Masjid Raya dan terdakwa telah mengetahui jika Saksi Muh. Rajab tidak mempunyai kartu kredit apalagi yang berjumlah 4 buah. Saksi juga telah berpesan kepada terdakwa untuk menggunakan kartu kredit tersebut secara berhati-hati. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.

ATAU

- Kedua:

Bahwa terdakwa Muh. Risal Dg. Mangatta bin Risman alias Candiki alias lcal pada hari minggu tanggal 26 januari 2014 kira-kira pukul 16.00 wita yang bertempat di rumah saksi Muh. Rajab Yusri bin Mahmud Kassa Dg. Mudo alias Rajab di Jalan Tanjung Bayam/jl. Seroja No. 26 Kota Makassar telah melakukan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, terdakwa lcal ditekepon oleh saksi Muh. Rajab untuk datang ke rumahnya kemudian pada pukul 17.00 wita terdakwa kemudian datang ke rumah saksi. Muh. Rajab lalu menyerahkan 4 buah kartu kredit masing-masing 1 buah kartu kredit bank BRI, 1 buah kartu kredit bank Mandiri, 1 buah kartu kredit bank Muamalat, dan 1 buah kartu kredit bank BCA untuk digesek. Terdakwa lalu menggunakan kartu kredit bank Mandiri tersebut untuk dicairkan secara tunai

sebesar Rp. 700.000,- di SPBU jl. Sam Ratulangi. Terdakwa kemudian memakai kartu kredit tersebut untuk berbelanja dengan total belanjaan sebesar Rp. 600.000,- di alfamart Jalan Masjid Raya dan terdakwa telah mengetahui jika Saksi Muh. Rajab tidak mempunyai kartu kredit apalagi yang berjumlah 4 buah. Saksi juga telah berpesan kepada terdakwa untuk menggunakan kartu kredit tersebut secara berhati-hati. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHPidana.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (2) KUHPidana karena yang terungkap dipersidangan adalah pembuktian Pasal 480 ayat (2) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Muh. Risal Dg. Mangatta bin Risman Ambo alias Candiki alias Ical seorang laki-laki yang sehat jasmani dan sehat rohani dalam hal mana terdakwa sadar akan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya dan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil suatu kejahatan

Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa menerima 4 buah kartu kredit yang dicuri oleh saksi Muh. Rajab Yusri bin Mahmud Kassa Dg. Mudo alias Rajab dan telah mempergunakan kartu kredit tersebut untuk mendapatkan keuntungan sedangkan terdakwa tahu bahwa saksi Muh. Rajab Yusri bin Mahmud Kassa Dg. Mudo alias Rajab tidak mempunyai kartu kredit apalagi sebanyak 4 buah. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan pembuktian tersebut maka Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah berdasarkan undang-undang yang mana terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan Muh. Risal Dg. Mangatta bin

Risman Ambo alias Candiki alias Ical, maka Penuntut Umum mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan Muh. Risal Dg. Mangatta bin Risman Ambo alias Candiki alias Ical terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muh. Risal Dg. Mangatta bin Risman alias Ambo alias Candiki alias Ical pidana penjara selama 10 bulan potong masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah handphone Blackberry Onix 2 warna putih dan 1 buah handphone Blackberry Onix 3 warna putih untuk dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.000,-.

5. Amar Putusan

Dalam perkara ini, setelah hakim memperhatikan pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 480 ke-2 KUHPidana, maka hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Risal Dg. Mangatta bin Risman alias Ambo alias Candiki alias lcal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”;
2. Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Blackberry Onix 2 warna putih, 1 (satu) buah handphone Blackberry Onix 3 warna putih dikembalikan kepada Mita DM. Sampepajung, SE. MSc, 1 (satu) lembar fotocopy resi pembelian BBM menggunakan kartu kredit Bank Mandiri, 1 (satu) rekaman CCTV dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Hal-hal yang dapat meringankan tersebut adalah :

- Terdakwa bersifat sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.

6. Komentar Penulis

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Ibrahim Paleno S.H.,M.H. yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan

atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal tersebut yang menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat pasal 480 ayat (2) tentang penadahan.

Setelah memeriksa semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (2) tentang penadahan. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan diantaranya, terdakwa bersifat sopan selama berlangsungnya persidangan dan terdakwa juga mengakui perbuatannya. Ibrahim Palino S.H., M.H. juga mengemukakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak terlalu berat dan tidak terlalu merugikan korban.

Pada perkara No. 626/Pid.B/2014/PN.Mks, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan hasil penyidikan telah memenuhi syarat formil karena telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum. Surat dakwaan tersebut juga telah berisi identitas tersangka (nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat, agama, pekerjaan, dan pendidikan) berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga telah memenuhi syarat materiil dimana pada surat dakwaan ini telah berisi uraian secara jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana dan uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Dalam perkara ini seperti yang dijelaskan sesuai dengan analisis yuridis pada surat tuntutan dengan Nomor Registrasi Perkara : PDM-17/PEL/Ep.1/04/2014 bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (2) KUHPidana karena yang terungkap dalam persidangan adalah pembuktian pasal 480 ayat (2) KUHPidana dengan unsur-unsur “barang siapa” dan “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil sesuatu kejahatan”.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kartu Kredit pada Putusan No. 626/Pid.B/2014/PN.Mks.

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan keputusan sangat diperlukan oleh hakim sebelum membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum,

keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal lainnya yang meringankan dan memberatkan. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang akan memberikan rasa keadilan, baik itu dari pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, ataupun masyarakat umum. Untuk itu sebelum menjatuhkan hukuman, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu mengenai kebenarannya dengan mencocokkannya dengan bukti-bukti yang ada setelah itu hakim akan mempertimbangkannya dan memberikan penilaian atas peristiwa atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu majelis hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana yang akan menjadi suatu pertanggungjawaban dan efek jera kepada terdakwa.

Amar putusan hakim pada perkara

No.626/Pid.B/2014/PN.Mks yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Muh.Risal Dg. Mangatta bin Risman Ambo alias Candiki alias lcal terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHPidana.
2. Memidana ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Blackberry Onix 2 warna putih, 1 (satu) buah handphone Blackberry Onix 3 warna putih, dikembalikan kepada

- Mita D. M. Sampepajung, S.E.,M.Sc, 1 (satu) lembar fotocopy resi pembelian BBM menggunakan kartu kredit Bank Mandiri, 1 (satu) rekaman CCTV dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Hal-hal yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah :

1. Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan Pasal 480 ke-1 atau ke-2 KUHPidana.
2. Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Selama persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan bahwa :

a. Saksi Mita D.M. Sampepajung, SE M.Sc

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Muh. Rajab Yusri bin Mahmud Kassa Dg. Mudo alias Rajab terhadap korban sendiri yang kejadiannya pada hari Minggu, 26 Januari 2014 sekitar jam 13.30 wita tepatnya di depan Rumah Makan Ujung Pandang Kota Makassar. Barang yang dicuri berupa :

1. Uang tunai yang terbungkus kertas sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

2. 1 (satu) buah dompet yang berisikan 6 (enam) buah kartu kredit, 6 (enam) buah kartu debit, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah NPWP dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) buah tas kecil make up;
 4. 1 (satu) buah iPhone;
 5. 2 (dua) buah handphone Blackberry.
- Saksi menerangkan bahwa kedua pelaku tidak menggunakan alat saat melakukan pencurian, tetapi terdakwa menggunakan sepeda motor;
 - Saksi menerangkan bahwa barang milik saksi dicuri oleh terdakwa berteman yang pada saat itu terdakwa berboncengan dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih;
 - Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- b. Saksi Dr. Djonny Ferianto, SP.B(K) Onk
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sendiri yang kejadiannya pada hari Minggu, 26 Januari 2014 sekitar jam

13.30 wita, tepatnya di depan Rumah Makan Ujung Pandang Kota Makassar, berupa:

1. Saksi menerangkan bahwa uang tunai yang terbungkus kertas sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas rupiah);
 2. 1 (satu) buah dompet dompet yang berisikan 6 (enam) buah kartu kredit, 6 (enam) buah kartu debit, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah NPWP dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) buah tas kecil make up;
 4. 1 (satu) buah iPhone;
 5. 2 (dua) buah handphone Blackberry.
- Saksi menerangkan bahwa kedua pelaku tidak menggunakan alat saat melakukan pencurian, tetapi terdakwa menggunakan sepeda motor;
 - Saksi menerangkan bahwa barang milik saksi dicuri oleh terdakwa berteman yang pada saat itu terdakwa berboncengan dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna biru;
 - Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- c. Saksi Muh Rajab Yusri bin Mahmud kassa Dg. Mudo alias Rajab

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 wita saksi telah memberikan kartu kredit kepada terdakwa sebanyak 4 buah masing-masing kartu kredit Bank Mandiri, kartu kredit Bank Muamalat, kartu kredit Bank BCA, dan kartu kredit Bank BRI;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menelpon terdakwa untuk memberikan kartu kredit sebanyak 4 (empat) buah dengan tujuan agar terdakwa menggunakan atau menggesek kartu kredit tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa kartu kredit tersebut didapat dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama saudara Ramba Daeng Maele alias Thomas (DPO);
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mengetahui kalau 4 (empat) buah kartu kredit tersebut bukan milik terdakwa dan saksi sempat memesan kepada terdakwa untuk berhati-hati menggunakan kartu kredit tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dimana saja kartu kredit tersebut di gunakan hanya terdakwa memberikan 1 (satu) pak rokok dan 1 (satu) bungkus minyak goreng dari hasil kartu kredit tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa saksi menyerahkan 4 (empat) buah kartu kredit tersebut kepada terdakwa dan berpesan agar terdakwa berhati-hati dalam menggunakan kartu kredit tersebut dan sepengetahuan saksi kartu kredit tersebut digunakan terdakwa hanya untuk berbelanja di Toko Alfamart Jl. Masjid Raya Kota Makassar, namun saksi tidak tahu kalau terdakwa juga sempat menggunakannya di tempat lain;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa menggunakan kartu kredit tersebut karena berharap mendapatkan suatu keuntungan.

d. Rizal bin Zainuddin

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 saat itu saksi dan saudara Fadli bekerja di Alfa Midi, kemudian sekitar pukul 23.00 wita saudara Fadli menyampaikan kepada saksi untuk menemaninya pergi menggesek kartu milik temannya di Alfamart Jl. Masjid Raya Kota Makassar, lalu sekitar pukul 01.00 wita saksi bersama saudara Fadli berboncengan menggunakan sepeda motor menuju jalan Masjid Raya;

- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi kartu kredit tersebut milik terdakwa karena terdakwa sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa pada saat itu di Alfamart adalah beberapa bungkus rokok dan keperluan lainnya.

4. Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan bahwa,

- Pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 wita, Muh Rajab Yusri bin Mahmud Kassa Dg Mudo alias Rajab telah memberikan kartu kredit kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) buah masing-masing kartu kredit Bank Mandiri, kartu kredit Bank Muamalat, Kartu kredit Bank BCA, dan kartu kredit Bank BRI;
- Terdakwa menerangkan bahwa Muh Rajab Yusri bin Mahmud Kassa Dg Mudo alias Rajab menelpon terdakwa untuk memberikan kartu kredit sebanyak 4 (empat) buah dengan tujuan agar terdakwa menggunakan atau menggesek kartu kredit tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui kalau 4 (empat) buah kartu kredit tersebut bukan milik Muh Rajab Yusri bin Mahmud Kassa Dg Mudo alias Rajab dan Muh Rajab Yusri bin Mahmud Kassa Dg Mudo alias Rajab memesan kepada terdakwa untuk berhati-hati menggunakan kartu kredit tersebut;

- Terdakwa menerangkan bahwa kartu kredit Bank Mandiri saja yang dapat digunakan oleh terdakwa;
 - Terdakwa menerangkan telah menggunakan kartu kredit yang di curi oleh Muh Rajab Yusri bin Mahmud Kassa Dg Mudo alias Rajab 5 kali yaitu pada saat mencairkan dana tunai di SPBU sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mencairkan dana tunai di SPBU Ratulangi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), berbelanja di Alfamart di Jl. Masjid Raya Kota Makassar sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu mencairkannya lagi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di SPBU Jl. Ratulangi serta memakai kartu kredit tersebut pada saat mengisi BBM motor terdakwa di SPBU Jl. Ratulangia.
5. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling berkaitan yang didukung pula dengan barang bukti yang ada sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuniya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.
6. Terdakwa terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :
- e. Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- f. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan.
 - Terdakwa mengakui perbuatannya.

2. Analisis Penulis

Putusan hakim yang baik yaitu yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi korban kejahatan, pelaku kejahatan, atau bagi masyarakat umum. Secara yuridis seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan hakim tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pemidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan karena hakim memiliki kewenangan untuk menilai suatu perkara apakah perkara tersebut dapat dipidana atau tidak. Dalam putusan pemidanaan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pemidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Pada perkara No. 626/Pid.B/2014/PN.Mks ini, penjatuhan hukuman hakim kepada terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara kepada terdakwa selama 10 bulan potong masa tahanan, sedangkan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada

terdakwa selama 6 bulan potong masa tahanan dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk pertimbangan dari aspek yuridis yang menjadi aspek paling penting dalam putusan hakim dan secara langsung berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim. Majelis Hakim menarik fakta-fakta dalam persidangan mengenai keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan. Selain itu hakim juga menganggap bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa tidak terlalu berat sehingga hakim memutuskan 6 bulan potong masa tahanan.

Tujuan hakim memberikan sanksi kepada orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu agar para pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Suatu pembedaan bukan sebagai sarana untuk melakukan balas dendam.

Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari diri penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi (Emi Wulansari, 2015:62).

Pendapat diatas sejalan dengan pemikiran penulis dimana pembedaan merupakan salah satu langkah untuk memberikan efek

jera, baik itu ditujukan untuk pelanggar itu sendiri maupun kepada orang-orang yang memiliki potensi dan niat untuk melakukan suatu kejahatan. Pemidanaan tersebut menjadi suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat. Dengan demikian tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi terpidana tetapi juga memberi alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggaran hukum.

Pada perkara Nomor 626/Pid.B/2014/PN.Mks ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penadahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan ketentuan pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam perkara putusan No.626/Pid.B/2014/PN.Mks berdasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti yang ada. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu mendakwakan Pasal 480 ayat (2) KUHPidana yaitu “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan, tetapi menurut penulis tuntutan yang diberikan tersebut tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dan akibat dari delik yang dilakukan tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan atas alat bukti berupa *visum et repertum*, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, sehingga

membuat terdakwa Muh. Risal Dg. Mangatta alias Ambo alias Candiki alias Ical patut dijatuhi hukuman. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya agar bisa memberikan efek jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebaiknya pada setiap perkara terdakwa harus selalu didampingi oleh penasehat hukum.
2. Aturan hukum sebaiknya dibuat sejelas mungkin agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya serta semua perbuatan yang meresahkan masyarakat dapat dikenai hukuman yang tegas.
3. Meningkatkan kewaspadaan serta kecurigaan terutama terhadap barang-barang yang tidak jelas sumbernya.
4. Keluarga seharusnya lebih memberikan pendidikan moral sejak awal dan mengajarkan hal-hal yang positif untuk mencegah anggota keluarga yang lain melakukan perbuatan jahat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana* 3. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ali Arifin. 2012. *Rahasia Mafia Kartu Kredit*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kanter, E.Y & S.R Sianturi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)*. Jakarta: Visi Media.
- Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Reality. 2008. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher

Skripsi

- Andi Bastian Basri. 2011. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Andi Emi Wulansari. 2015. *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak*, Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ike Pratiwi Mustafa. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan*, Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Lampiran

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.626/Pid.B/2014/PN.Mks terkait kasus tindak pidana penadahan.